



DOKUMEN POHON KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 – 2029 RENSTRA FINAL

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN



POHON KINERJA 2025 – 2029

POHON KINERJA TAHUN 2025 – 2029
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

SASARAN RPJMD :

1. Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah
2. Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing

TUJUAN RPJMD :

1. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah
2. Memperkuat pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan
3. Meningkatkan Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik

INDIKATOR RPJMD

1. Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%)
2. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)
3. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)
4. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah

Indikator Daerah : Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%), Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase), Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase), Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing

Indikator Daerah : Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%), Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase), Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase), Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

Indikator Daerah : Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%), Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase), Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase), Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam

IK : Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi

IK : Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)

Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi

IK : Persentase Koperasi Aktif

Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian

IK : Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)

Meningkatnya produktivitas koperasi

IK Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri

IK : Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal , Pertumbuhan Wirausaha (%)



Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi

IK : Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya

Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

IK : Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor

IK : Nilai Ekspor Barang (Nilai)

Meningkatnya realisasi pembangunan industri

IK : Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri



Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

IK : Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha

IK : Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi

Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk

IK : Persentase penanganan pengaduan konsumen

Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian

IK : Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan

Meningkatnya pemanfaatan informasi industri

IK : Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini



Meningkatnya daya saing UMKM

IK : Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor

Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam

IK : Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam

Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

IK : Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan



SUB Kegiatan untuk mendukung Sasaran dan IK

1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
5. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
7. Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota
8. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
9. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
10. Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
11. Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota



SUB Kegiatan untuk mendukung Sasaran dan IK

1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
4. Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
6. Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
7. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
8. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
9. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
10. Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
11. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
12. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
13. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi



SUB Kegiatan untuk mendukung Sasaran dan IK

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



12. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
13. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
14. Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
15. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
16. Pemulihan Usaha Mikro
17. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
18. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
19. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
20. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
21. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

14. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
15. Pameran Dagang Nasional
16. Pameran Dagang Lokal
17. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
18. Peningkatan Citra Produk Ekspor
19. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
20. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
21. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
22. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
23. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
24. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
25. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
26. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

16. Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang
17. Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
18. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
19. Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
20. Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
21. Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
22. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA- B2
23. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA- B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
24. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
25. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
26. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
27. Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pengawasan Metrologi Legal
28. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
29. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
30. Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bontol Selatan,



HARMITO, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700201 199303 1 019